



**KEMUNCULAN MASYARAKAT SOSIAL ORANG PULO SEBAGAI DAMPAK
URBANISME KEPULAUAN SERIBU**

Oleh

Natanael Martua Parningotan Simanjuntak^{1*}, Husnul Fitri Sundoko²

^{1,2}Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas
Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: ¹natansimanjuntak77@gmail.com, ²husnul.fitri20@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kemunculan masyarakat sosial *Orang Pulo* sebagai dampak dari urbanisme di Kepulauan Seribu serta mengkaji perubahan yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari catatan sejarah di kawasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang proses urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penjabaran catatan sejarah di Kepulauan Seribu dan menganalisisnya dengan teori urbanisme yang dikemukakan Paul Wheatley yang menjelaskan proses urbanisme dalam 2 bentuk, yaitu Sistem Kebangkitan dan Sistem Paksaan. Dalam studi kasus Kepulauan Seribu, proses urbanisme dimulai dari proses kolonialisme sebagai awal mula terjadinya terjadinya integrasi sosial budaya. Hal ini menyebabkan munculnya masyarakat sosial baru yang menyebut dirinya sebagai *Orang Pulo*. Proses urbanisme dengan sistem paksaan di Kepulauan Seribu menyebabkan transformasi masyarakat menjadi masyarakat yang lebih terurbanisasi. Sistem paksaan tersebut membawa dampak signifikan terhadap kemunculan masyarakat sosial *Orang Pulo*, yang mengalami perubahan dalam gaya hidup dan pola interaksi sosial, seiring dengan proses urbanisme yang terjadi.

Kata Kunci: Kepulauan Seribu ; Urbanisme ; Sistem Paksaan ; dan Kolonialisme

PENDAHULUAN

Proses urbanisme adalah fenomena yang tak terelakkan di perkotaan, dengan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Wheatley (1983) berpendapat bahwa urbanisme adalah konsep yang memiliki beragam makna, yang dapat disimpulkan sebagai proses integrasi sosial dan budaya di dalam masyarakat kota. Urbanisme dipandang dari tiga konsep, yaitu konsep perilaku (transformasi perilaku kolektif), konsep struktural (pola aktivitas kolektif), dan konsep prosedural (konsentrasi progresif masyarakat). Teori ini memandang urbanisme sebagai transformasi masyarakat sebagai entitas sosial dan interaksinya dalam kota. Urbanisme meletakkan meletakkan pertumbuhan kota bukan sebagai ‘sebab’,

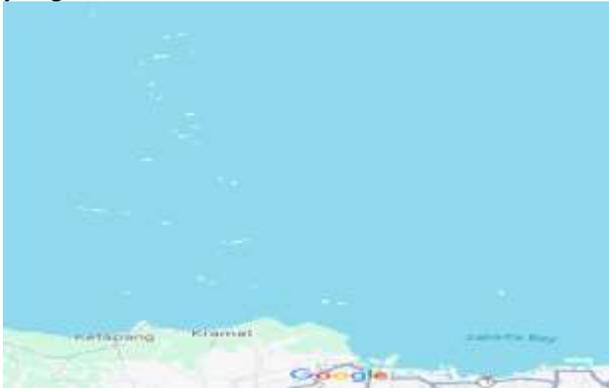
namun sebagai ‘akibat’ dari transformasi masyarakat sebagai entitas sosial.

Dalam teori Wheatley (1983), tradisi berkota di Nusantara mencerminkan 2 sistem, yaitu sistem kebangkitan (*generation*) dan sistem paksaan (*imposition*). Sistem kebangkitan terjadi bila seluruh jaringan dan unsur - unsur terkait dalam kehidupan berkota itu timbul dari nilai - nilai setempat oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, sistem dari luar mungkin bersinggungan dengan sistem tempat tersebut, namun sistem setempat mampu mengatasi dan menyerapnya ke dalam sistem yang ada dalam kehidupan. Sistem paksaan terjadi bila jaringan dan unsur - unsur terkait datang dari luar dan menghapus atau menindas sistem setempat. Dalam hal ini paksaan atas sesuatu yang telah berlaku dan menyebabkan



ketidakberdayaan lokal terhadap nonlokal (Tjahjono, 1999).

Teori Wheatley, yang membedakan antara sistem kebangkitan dan sistem paksaan dalam konteks perkotaan, memiliki dampak yang signifikan dalam pemikiran perkotaan. Teori ini memberikan pemahaman tentang dinamika yang terlibat dalam interaksi antara nilai-nilai lokal dan pengaruh luar. Dengan mengidentifikasi sistem kebangkitan dan sistem paksaan, analisis dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana budaya lokal mampu bertahan dan menyesuaikan diri terhadap pengaruh luar, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh keberlangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya di wilayah tersebut. Wheatley memberikan kerangka berpikir untuk menganalisis urbanisme dan budaya di perkotaan, yang dapat menjelaskan kompleksitas perkotaan dan dinamika budaya yang terlibat.



Gambar 1.0 Peta Kepulauan Seribu (Sumber: Google, 2024)

Sebagai wilayah yang terletak di perairan Jakarta, Kepulauan Seribu telah mengalami perubahan sosial dan budaya dalam beberapa dekade terakhir akibat proses urbanisme. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 1 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 8,70 km². Wilayah Kepulauan Seribu terdiri dari 113 buah pulau yang terbagi dalam 2 kecamatan dan 6

kelurahan, namun hanya ada 11 pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung Besar, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, Pulau Payung Besar, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, dan Pulau Sebira. Fenomena menarik yang muncul sebagai dampak dari urbanisme di Kepulauan Seribu adalah kemunculan masyarakat sosial yang dikenal sebagai *Orang Pulo*. Istilah *Orang Pulo* mengacu pada sekelompok masyarakat lokal yang mengalami transformasi budaya dan sosial sebagai dampak proses urbanisme yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang asal usul dan karakteristik *Orang Pulo*, serta untuk memahami proses urbanisasi yang membentuk identitas mereka.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kemunculan masyarakat sosial baru sebagai dampak dari urbanisme di Kepulauan Seribu serta mengkaji perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat urbanisasi ditinjau dari catatan sejarah kawasan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori dua sistem urbanisme Paul Wheatley di buku *Nagara and Commandary, Origins of the Southeast Asian Urban Traditions* (1983), yaitu sistem kebangkitan (*generation*) atau sistem paksaan (*imposition*). Pemahaman mengenai fenomena ini tidak hanya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana urbanisme mempengaruhi kehidupan masyarakat di Kepulauan Seribu, pi juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teoritis tentang dinamika urbanisasi di wilayah kepulauan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi studi tentang perkembangan perkotaan di wilayah kepulauan dan juga bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-



deskriptif melalui penelusuran catatan sejarah Kepulauan Seribu serta menganalisisnya menggunakan teori urbanisme yang dikemukakan Paul Wheatley (1983) di buku *Nagara and Commandary, Origins of the Southeast Asian Urban Traditions*. Dalam teorinya, Paul Wheatley menjelaskan proses urbanisme dalam dua bentuk, yaitu Sistem Kebangkitan dan Sistem Paksaan. Kelebihan teori ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai lokal berinteraksi dengan pengaruh luar dalam perkembangan perkotaan. Sistem kebangkitan, yaitu nilai-nilai setempat mendorong perkembangan kota, dan sistem paksaan, yaitu pengaruh luar mendominasi atau menindas nilai-nilai lokal, teori Wheatley dapat menjadi dasar analisis yang komprehensif tentang bagaimana perkotaan berkembang dan bagaimana budaya lokal bertahan atau berubah dalam menghadapi tantangan globalisasi. Teori Wheatley memberikan kerangka berpikir yang holistik dan kontekstual untuk memahami urbanisme, yang mengakui kompleksitas dinamika budaya dan nilai-nilai lokal yang terlibat dalam pembentukan kota. Data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, laporan pemerintah dan dokumen yang memuat penelitian-penelitian terdahulu mengenai catatan sejarah Kepulauan Seribu, serta wawancara terhadap Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif menggunakan teori serta dampaknya terhadap pembentukan masyarakat sosial *Orang Pulo*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kepulauan Seribu

Catatan sejarah Kepulauan Seribu tidak bisa terlepas dari catatan sejarah Jakarta. Pada awal abad ke XVI, Sunda Kelapa (nama Kota Jakarta saat itu) adalah kota pelabuhan Kerajaan Padjajaran yang berada di jalur rempah-rempah antara Malaka dan Maluku. Ita Syamtasyah (1994) menyebutkan bahwa posisi ini menyebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa

sering dikunjungi kapal-kapal dari India, Cina, termasuk dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa Timur. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa direbut oleh armada Kesultanan Cirebon dan Banten yang dipimpin oleh Fatahillah, yang selanjutnya mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kesultanan Banten kemudian memindahkan pusat perdagangan dari Pelabuhan Jayakarta ke Pelabuhan Banten. Pada tahun 1596, Belanda tiba di Pelabuhan Banten untuk pertama kalinya dengan tujuan mendapatkan rempah-rempah dan kemudian mendirikan *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang mempersatukan perusahaan dagang Belanda agar lebih kuat menghadapi persaingan dari pedagang Eropa lainnya. Ketegangan hubungan antara VOC dengan Kesultanan Banten menjadi penyebab perpindahan kantor dagang VOC ke Jayakarta yang pada saat itu berada dibawah kepemimpinan Pangeran Jayakarta.

VOC kemudian melakukan berbagai pembangunan di wilayah Kepulauan Seribu. Misalnya, pada tahun 1656 di Pulau Onrust dibangun benteng kecil bersegi empat dengan dua bastion, yaitu bangunan yang menjorok keluar yang berfungsi sebagai menara pengintai. Pada tahun 1671 bangunan tersebut diperluas menjadi bangunan bersegi lima dengan bastion di setiap sudutnya, yang seluruhnya terbuat dari bata dan karang. Kemudian pada 1674 di Pulau Onrust juga dibangun gudang penyimpanan barang, gudang penyimpanan besi, dok tancap dan kincir angin. Pembangunan tersebut kemudian meluas ke Pulau Cipir yang berada di sisi selatan Pulau Onrust untuk menambah kapasitas gudang penyimpanan barang (Wurjantoro, 1994). Tahun 1679, VOC membangun benteng dan rumah sakit untuk penderita lepra dan kusta di Pulau Sakit, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Bidadari (Adryamarthanino, 2022). Selanjutnya di tahun 1850, VOC mendirikan Benteng Martello di Pulau Keurkof (sekarang Pulau Kelor) yang dalam bahasa Belanda artinya adalah pulau makam. Benteng ini



difungsikan sebagai sistem pertahanan sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh (Ardianto, 2023).

Syamtasiyah (1994) menyebutkan bahwa setelah Belanda menguasai Batavia, teluk Batavia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah Hindia Belanda pada saat itu. Kepulauan Seribu disebut sebagai *Duizend Eilanden* yang terdiri dari seratus pulau. Dalam tinjauan sejarah, alasan penamaan pulau-pulau di Teluk Batavia disebut Kepulauan Seribu karena penduduk lokal pada saat itu menganggap angka yang lebih dari seratus adalah seribu. Sedangkan jumlah pulau Kepulauan Seribu pada saat itu juga sudah melampaui seratus pulau, maka masyarakat lokal menyebutnya sebagai Kepulauan Seribu.

Syamtasiyah (1994) juga mengungkapkan asal-usul penamaan pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Seperti Pulau Panggang, yang merupakan salah satu pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu dengan jumlah penduduk sebesar 280 jiwa pada tahun 1905. Nama Pulau Panggang pada awalnya berkaitan dengan kondisi di masa tersebut ketika banyak bajak laut dari Sulawesi Selatan yang berada di perairan Teluk Batavia dengan tujuan merampas kapal-kapal dagang. Kapal-kapal dagang tersebut dirampas dan orang-orangnya dipanggang sampai mati di pulau tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi asal nama Pulau Panggang. Hingga kini di Pulau Panggang masih dapat ditemui kuburan yang diperkirakan makam salah satu pemimpin bajak laut yang dikenal dengan nama Darah Putih. Pulau Kelapa, yang pada tahun 1905 dihuni 600 jiwa penduduk, dinamakan Pulau Kelapa karena disana ditemukan banyak pohon kelapa, yang pada saat banjir datang, dipanjat oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri. Pada tahun 1905, penduduk kedua pulau ini sudah heterogen, terdiri dari orang Bugis, Mandar (Sulawesi Selatan), orang-orang dari Pantai Borneo, Sumatera, Jawa dan Sumbawa. Orang-orang Bugis kemudian banyak berpindah dan menetap di Pulau Kelapa Dua. Dalam

penelitian tersebut, Ita Syamtasiyah juga menyebutkan bahwa Pulau Kelapa Dua dihuni seluruhnya oleh orang Bugis (± 20 Kepala keluarga berprofesi nelayan).

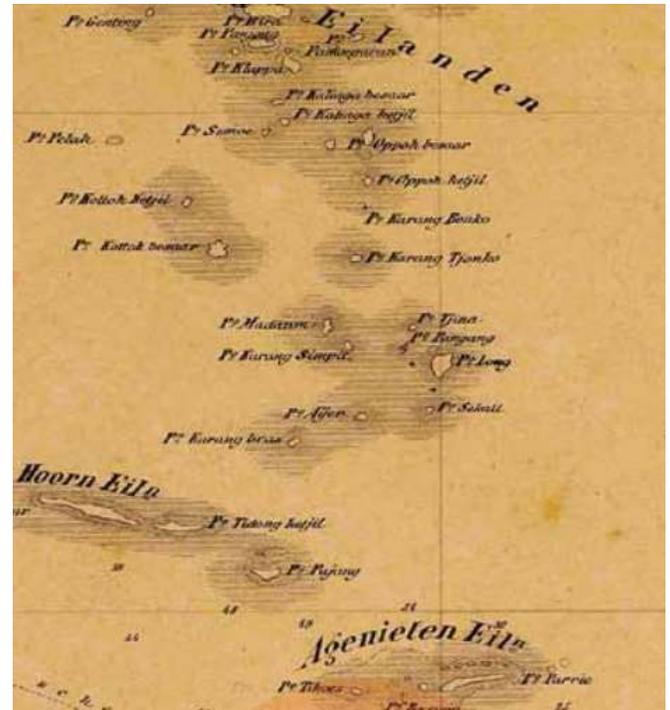
Salah satu kelurahan di wilayah Kepulauan Seribu, yaitu Kelurahan Pulau Untung Jawa, adalah kumpulan pulau – pulau yang semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah dihuni oleh orang – orang dari daratan Pulau Jawa. Dulunya Pulau Untung Jawa memiliki nama Pulau *Amsterdam Mester*. Nama ini berasal dari nama kapal perang Belanda terdampar di pantai timur Pulau Untung Jawa. Pada sekitar tahun 1930-an, terjadi perpindahan penduduk dari Pulau Kelor ke Pulau *Amsterdam Mester* akibat bencana abrasi. Kedatangan penduduk dari Pulau Kelor tersebut diterima dengan tangan terbuka oleh warga Pulau *Amsterdam Mester*. Semenjak saat itu pula, Pulau *Amsterdam Mester* berganti nama menjadi Pulau Untung Jawa, yang berarti keberuntungan bagi orang-orang daratan Pulau Jawa. Pada tanggal 13 Februari 1954, penduduk Pulau Ubi juga berpindah ke Pulau Untung Jawa akibat bencana abrasi. Perpindahan ini diabadikan dalam sebuah tugu perpindahan yang berada di Pulau Untung Jawa.

Prakoso (2019) mengungkapkan asal-usul penamaan Pulau Tidung, yang pada masa kolonial Belanda merupakan tempat pengasingan tahanan-tahanan politik Belanda. Dulunya pulau ini bernama Pulau Air Besar. Nama *Tidung* berasal dari seorang raja bernama Raja Pandhita yang berasal dari Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Raja Pandhita pada saat itu dikenal sebagai sosok yang sangat menentang penjajahan Belanda. Raja Pandhita kemudian diasingkan oleh Belanda ke Banjarmasin lalu Jepara kemudian ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Tidung pada tahun 1892. Hingga kematiannya pada tahun 1898 di Pulau Air Besar, masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa Pandhita adalah seorang raja yang diasingkan oleh Belanda. Semasa hidupnya, Raja Pandhita mengaku sebagai Muhammad Kaca, atau dipanggil Nek



Kaca. Semasa hidupnya di Pulau Air Besar, Raja Pandhita adalah salah satu tokoh masyarakat disana. Beliau jugalah yang memberikan nama untuk Pulau Air Besar menjadi Pulau Tidung. Penelusuran yang dilakukan perwakilan dari Suku Tidung, Kalimantan Utara pada tahun 2011 membongkar identitas asli Nek Kaca yang sebenarnya adalah Raja Pandhita yang diasingkan oleh Belanda, 113 tahun setelah kematiannya. Saat ini makam Raja Pandhita dapat ditemukan di Pulau Tidung dan merupakan salah satu objek wisata di pulau tersebut.

Peta tahun 1853 dari Baron Melvill van Carnbee mencantumkan Pulau Pangang (saat ini dikenal sebagai Pulau Panggang) dalam satu kelompok bersama Pulau Tjina (Pulau Karya), Pulau Long (Pulau Pramuka) dan beberapa pulau tanpa nama. Pulau Panggang ditampilkan jauh lebih kecil dari keadaan Pulau Panggang saat ini. Satu pulau tanpa nama dengan ukuran relatif sama dengan Pulau Panggang memiliki kedudukan yang sama dengan Pulau Gusung Jari merupakan lokasi PT Nusa Keramba saat ini (Pulau Gosong Pramuka). Tanda lingkaran pada Pulau Pangang sesuai dengan legenda peta merujuk pada *Andere plaatsen en Kampongs* (desa yang lain dan Perkampungan) atau *Poststations*, yang mengindikasikan bahwa permukiman yang sebelumnya tercatat pada peta sebelumnya tahun 1761 masih berlanjut. Peta ini tidak menandai adanya hunian di kelompok pulau yang lain, di antaranya *Hoorn-eiland* (saat ini dikenal sebagai Pulau Tidung), *Agnieten-eiland* (Pulau Pari), atau Pulau Ayer. (Irsyad, 2012, hal. 56)



Gambar 3.1 Peta Baron Melvill van Carnbee (Irsyad, 2012, hal. 56)

Pada tanggal 1 April 1905, Pemerintah Hindia Belanda meningkatkan status Residensi Batavia sebagai *Gemeente Batavia* (Kotapraja Batavia) melalui *Ordonnantie* atau Undang-undang tanggal 18 Maret 1905. *Ordonnantie* tersebut juga mengatur pemerintahan di Kepulauan Seribu. *Duizend-eilanden* melekat secara administratif pada *afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* dengan struktur pemangku jabatan, yaitu seorang *Inlandsche Posthouder* (Pemegang Pos Pribumi), seorang *Mandoer-oppasser* (Mandor Pengawas sekaligus Juru Tulis untuk Kepala), seorang *Politie-oppasser* (Polisi), lima orang *Inlandsche Wijkmeesters* (Bek Pribumi), lima *Matros* (pelaut) untuk perahu kolek dinas *Posthouder*. *Regeerings Almanak voor Nederlands-Indië* tahun 1907 mencatat nama Radja Sabaroedin, yang diangkat pada 23 Juni 1905 sebagai *Indlandsch posthouder der Duizend-eilanden, Agnieteneilanden en Hoorn-eilanden* (Pribumi Pemegang Jabatan dari Kepulauan Seribu, Pulau Pari, dan Pulau Tidung), berkedudukan di Poeloe Panggang

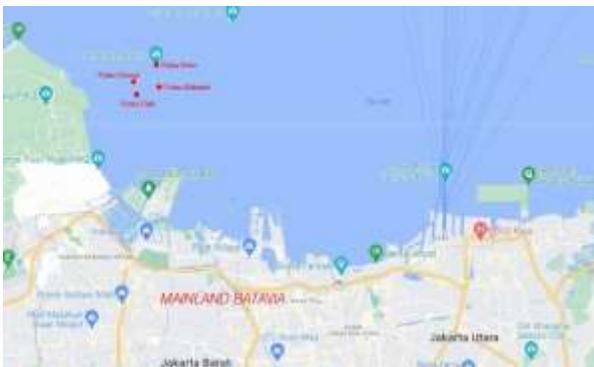


(sekarang dikenal sebagai Pulau Panggang).
Regeerings Almanak voor Nederlands-Indië



Gambar 3.2 Foto-foto koleksi Pioniersfotografie diambil pada kurun waktu 1900-1910

tahun 1907 juga mencatat nama Kasan Djaban Abdoel Moehi, diangkat pada 27 Maret 1907 sebagai *Indlandsch posthouder der Duizend-eilanden, Agnieten-eilanden en Hoorn-eilanden*, berkedudukan di Poeloe Panggang. Foto-foto koleksi *Pioniersfotografie* diambil pada kurun waktu 1900-1910, memastikan bangunan kantor kelurahan yang ada saat ini telah berdiri. Denah bangunan dulu dan sekarang tidak memiliki perubahan yang berarti dan masih mempertahankan bentuk sebagai rumah panggung bergaya Sunda. Bentuk limas dari atap juga masih bertahan, namun belum ada pendopo kayu. Pada saat itu, seluruh bangunan masih menggunakan bahan baku kayu (Irsyad, 2012).



Catatan sejarah yang telah diuraikan menunjukkan bahwa VOC menjadikan Kepulauan Seribu sebagai area pertahanan pulau utama (*mainland*) Batavia dari serangan musuh, seperti Kerajaan Inggris. Secara geografis, Pulau Onrust, Pulau Kelor, Pulau Bidadari dan Pulau Cipir adalah empat pulau di Kepulauan Seribu yang jaraknya paling dekat

dengan Jakarta. Wurjantoro (1994) mencatat bahwa Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari dua kali diratakan oleh armada Kerajaan Inggris dan Kesultanan Banten pada tahun 1800 dan 1804. Pada tahun 1883, VOC memindahkan seluruh kegiatan di pulau-pulau ini ke Pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap lebih menguntungkan karena dekat dengan sumber air bersih.

Pengaruh Kolonialisme Belanda Pada Urbanisme Kepulauan Seribu

Dari penjelasan catatan sejarah yang telah dijabarkan, sebelum masuknya penjajahan Belanda tahun 1610 dan perebutan kekuasaan oleh Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Banten pada 1527, Kepulauan Seribu adalah gugusan pulau-pulau kecil di Teluk Sunda Kelapa. Wurjantoro (1994) menyebutkan penduduk asli Kepulauan Seribu adalah penduduk etnik suku Jawa yang bermigrasi dari pesisir Pulau Jawa. Namun, perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa oleh Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Banten pada tahun 1527, membawa migrasi penduduk etnik suku Betawi dari pesisir utara Banten, yaitu Mauk dan Kronjo (Budiyanti, 2015). Dengan mengkategorikan perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa oleh Kerajaan Banten sebagai bentuk kolonialisme, dapat dikatakan bahwa penduduk asli Kepulauan Seribu adalah penduduk etnik suku Jawa yang bermigrasi dari pesisir utara Pulau Jawa. Masuknya kelompok etnik suku Betawi setelah 1527 adalah proses urbanisme pertama yang terjadi di Kepulauan Seribu melalui peperangan yang menyebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa jatuh kepada penguasaan Kerajaan Banten. Hal ini, membuka jalan bagi kelompok etnik suku Betawi dari Banten untuk bermukim di Kepulauan Seribu.

Masuknya VOC pada 1610 menjadikan Pelabuhan Jayakarta sebagai pelabuhan yang penting untuk perdagangan. Budiyanti (2015) menyebutkan bahwa pada saat itu generasi pertama kelompok etnik Suku Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat telah menetap di Kepulauan Seribu. Kelompok etnik Suku

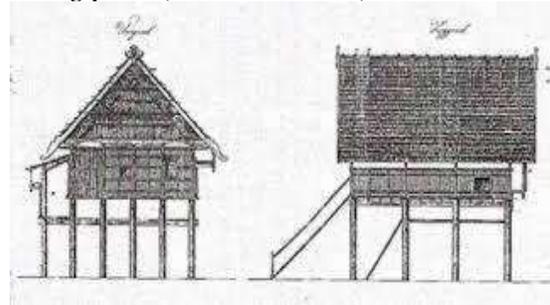


Mandar datang ke Pelabuhan Jayakarta untuk berdagang dan menetap di Pulau Panggang, Pulau Palembang (sekarang Pulau Harapan) dan Pulau Tidung. Lalu dilanjutkan dengan kelompok etnik Suku Bugis dari Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pelaut handal yang datang ke wilayah perairan Jayakarta sebagai bajak laut untuk merampok kapal-kapal dagang, dan bermukim di Pulau Panggang. Gelombang terbesar kedatangan kelompok etnik Suku Bugis terjadi pada 1959 karena alasan keamanan ketika saat itu sedang terjadi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di beberapa wilayah Indonesia.

Kelompok etnik Bugis datang ke Kepulauan Seribu mengikuti jejak kerabat-kerabat mereka yang sudah lebih dahulu menetap di wilayah tersebut. Sebagian besar kelompok etnik ini tinggal dan menetap di Pulau Genteng besar, dan sebagian kecilnya menyebar di pulau-pulau yang berpenduduk. Kelompok etnik Bugis banyak tinggal di Pulau Genteng Besar sampai sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, seluruh lahan di Pulau Genteng Besar dibeli oleh seorang pengusaha dan kemudian dijadikan pulau resort pribadi. Sekitar 70 kepala keluarga yang ketika itu tinggal di Pulau Genteng Besar harus pindah ke pulau lain sedangkan 50 kepala keluarga pindah ke Pulau Sabira, yang terletak di ujung utara wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, sebagian kecil penduduk lainnya memilih tinggal di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan. Mereka menimbun gosong di antara Pulau Kelapa dan Pulau Harapan untuk membangun rumah di sana. Namun, warga Pulau Kelapa dan Pulau Harapan menolak kehadiran warga pindahan dari Pulau Genteng Besar tersebut sehingga kelompok warga pindahan ini akhirnya tinggal dan menetap di Pulau Kongsi (sekarang Pulau Kelapa Dua).

Berdasarkan penelusuran sejarah yang telah diuraikan maka pengaruh kolonialisme sangat besar dalam proses urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu. Kolonialisme

Kerajaan Banten pada 1527 dan masuknya VOC pada 1610 adalah awal mula terjadinya proses urbanisme di Kepulauan Seribu. Sampai saat ini, Kepulauan Seribu terdiri dari 4 kelompok etnik besar, yaitu kelompok etnik Suku Mandar, Suku Bugis, Suku Betawi dan Suku Jawa yang ditambah dengan beberapa etnik dengan jumlah kecil yaitu kelompok etnik Suku Sunda, Melayu dan Madura. Mereka tidak lagi mengidentifikasi kelompoknya sesuai sukunya, dan menyatakan dirinya sebagai *orang pulo* (Maulana, 2009).



Gambar 3.5 Tampak Rumah Bugis
(Sumber: Fauzan, 2022)

Bentuk urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu salah satunya dapat terlihat dari hunian yang terbentuk di Kepulauan Seribu. Menurut Raziq dan Prabowo (dalam Fauzan, 2022), rumah adat Bugis umumnya berbentuk panggung terutama dari permukiman pesisir yang sebagian besar berada di atas permukaan laut (Gambar 3.5). Gaya arsitektur hunian panggung ini dapat dilihat di sepanjang pesisir pantai pulau Kelapa Dua dan Pulau Sabira, yang mayoritas penduduknya adalah kelompok etnik Suku Bugis (Gambar 3.6).



Gambar 3.6 Hunian Panggung di Pulau Kelapa Dua (kiri), Hunian Panggung di Pulau Sabira (kanan)
(Sumber: www.lintaspulauseribu.com)

Di Pulau Panggang, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sabira pada saat ini sudah tidak banyak yang menggunakan gaya arsitektur hunian panggung. Hunian panggung hanya dapat ditemui di sepanjang pesisir pantai. Namun menurut Irsyad (2002), pada tahun 1980an dan 1990an, rumah panggung adalah pemandangan lazim hunian di Kepulauan Seribu. Pada saat itu hunian panggung bergaya “Makassar” merupakan salah satu ciri Kepulauan Seribu. Selleger (1906), menandai kesukaan penghuni pulau dengan bentuk rumahnya. Menurutnya, berdasarkan konstruksi bangunan, hunian tradisional pada Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panggang bergaya Bugis sedangkan pada Pulau Tidung bergaya Melayu. Rumah-rumah panggung ini umumnya bertopang pada permukaan batu karang dengan menggunakan tangga perahu sebagai tangga rumah. Selleger (1906) beranggapan bahwa penduduk pulau-pulau ini adalah keturunan perompak Bugis dan Mandar.

Menurut Mattulada dari Koentjaraningrat (1991), filosofi dari rumah adat Bugis, meliputi:

1. Dunia Atas (*Rakkeang*), terkait dengan kepercayaan yang tidak dapat dilihat. Dalam kepercayaan masyarakat Bugis, dunia atas adalah rumah Dewi Padi (*Sange-Serri*). Dalam kepercayaan

Bugis, *Rakkeang* adalah bagian rumah yang suci yang digunakan untuk menyimpan hasil panen.

2. Dunia Tengah (*Ale Bola*), terkait dengan kehidupan sehari-hari.
3. Dunia Bawah (*Awa Soo/kolong*), terkait dengan pencarian rezeki, seperti tempat menyimpan alat pertanian maupun kandang ternak

Secara horizontal, rumah tradisional Bugis dibagi dalam tiga ruang yang disebut sebagai *lontang* (*latte*), yaitu *Lontang Risaliweng* atau ruang depan untuk menerima tamu; *Lontang Retengah* atau ruang tengah yang digunakan untuk tempat tidur kepala keluarga dan istrinya. Juga digunakan untuk aktivitas utama seperti ruang makan; serta *Lontang Rilaleng* adalah ruang belakang rumah yang biasanya isinya adalah tempat tidur orang lanjut usia dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang rentan. Selain itu juga biasanya digunakan sebagai area pelayanan.

Filosofi rumah tradisional Bugis tersebut diterapkan dan dapat ditemui dalam hunian panggung di Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sabira. Kolong hunian digunakan untuk menyimpan alat - alat yang digunakan untuk menangkap ikan seperti jala dan alat menenun jala. Dari hasil wawancara dengan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diketahui bahwa penataan ruang dalam hunian panggung di Pulau Kelapa Dua dan Sebirra terdiri dari tiga ruangan, yaitu teras, ruang tengah yang juga digunakan untuk ruang tidur dan ruang belakang yang terdiri dari dapur dan kamar mandi. Namun perbedaannya terletak pada bagian atas hunian panggung di Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sebirra yang hanya berfungsi sebagai atap saja dan tidak digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti konsep *Rakkeang* pada rumah tradisional Suku Bugis.



Gambar 3.7 Foto Satelit Pulau Untung Jawa (1), Pulau Panggang (2), Pulau Kelapa Dua (3)
(Sumber: maps.google.com)

Dilihat dari foto citra satelit (Gambar 3.7), dapat ditemukan perbedaan yang dapat menunjukkan proses urbanisasi yang berbeda yang terjadi di masing - masing pulau dalam penataan permukiman di area pesisir pantai antara Pulau Untung Jawa, yang didominasi kelompok etnik Suku Jawa, dengan Pulau Panggang, yang dalam catatan sejarah adalah pulau tempat bermukim perompak asal Bugis, serta Pulau Kelapa Dua, sebagai tempat bermukim kelompok etnik Suku Bugis yang bermigrasi dari Sulawesi Selatan. Penataan permukiman pesisir di Pulau Untung Jawa, tidak menyentuh area perairan. Hal ini berbeda dengan penataan permukiman pesisir di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa Dua, yang batas permukimannya menjorok ke atas perairan dangkal. Hal ini berkaitan dengan karakter bangunan tradisional Suku Bugis seperti yang telah dijelaskan.



Gambar 3.8 Masaupi dalam Pertunjukan Pecak Mandar Pulau Tidung
(Sumber: Idris, 2023)

Selain itu, urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu dapat dilihat dari tradisi masyarakat setempat. Di Pulau Tidung, yang namanya berasal dari nama sebuah kerajaan di Kalimantan Utara, memiliki tradisi Pecak Mandar. Pecak Mandar atau silat Mandar adalah seni beladiri yang berasal dari suku Betawi namun sudah dipengaruhi oleh seni beladiri Suku Mandar. Kelompok Pecak Mandar di Pulau Tidung dipimpin oleh Masaupi (52 Tahun) yang sering mengadakan pertunjukan budaya Pecak Mandar dalam perayaan atau festival yang diadakan di Pulau Tidung (Gambar 3.8). Masaupi mewarisi keahlian pencak mandar dari Ayahnya yang asli suku Mandar.

Akulturasi kebudayaan Suku Bugis juga terlihat dalam ritual kebudayaan “sedekah laut”. Tradisi sedekah laut dimaknai sebagai syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang selama ini diberikan. Selain sebagai ucapan syukur, tradisi ini juga menjadi bentuk doa dan harapan agar masyarakat di Kepulauan Seribu selalu sejahtera, dan tidak ada bencana. Tradisi sedekah laut dimulai dengan pembacaan doa di dermaga, lalu para nelayan akan berlayar ke tengah laut dan menghanyutkan beberapa jenis makanan yang sudah disiapkan. Selain menghanyutkan makanan, tradisi syukuran laut ini juga dimeriahkan dengan aksi saling siram antar

kapal. Umumnya, tradisi sedekah laut digelar setahun sekali yakni pada tahun baru Islam. Tradisi ini masih dilakukan oleh nelayan hingga saat ini. Di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan juga dilakukan juga tradisi yang sama dengan nama yang berbeda. Safa'atul Anam (dalam Kurniawan, 2023), menyebutkan bahwa budaya di Pulau Harapan dan Kelapa adalah asimilasi antara budaya Suku Bugis, Mandar, Jawa dan Betawi. Salah satu bentuk asimilasi budaya ini adalah tradisi “Petik Laut” yang merupakan tradisi syukuran dengan cara melarungkan hasil bumi ke laut. Proses urbanisme dalam bentuk akulturasi budaya juga dapat dilihat dari makanan khas Kepulauan Seribu. Contohnya adalah makanan khas Pulau Sebir, yaitu Kue Barongko yang juga adalah makanan khas suku Bugis, Sulawesi Selatan. Makanan ini berbahan dasar pisang dengan campuran telur, gula, garam dan santan.



Gambar 3.9 Tradisi Sedekah Laut Kepulauan Seribu
(Sumber: Matsuki, 2022)



Gambar 3.10 Kue Barongko, Makanan Khas Pulau Sebir
(Sumber: Ibnu, 2023)

Proses urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu juga dapat terlihat dari penggunaan bahasa sehari - hari. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat Kepulauan Seribu tidak lagi mengidentifikasi diri mereka dari kelompok etniknya. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai *orang pulo*. Bahasa yang digunakan oleh *orang pulo* disebut sebagai “Bahasa Indonesia-Pulo”. Kramadibrata (1994) menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia-Pulo adalah Bahasa Indonesia yang disertai dengan penggunaan kosakata Mandar, Bugis, Jawa, Betawi dan Sunda, yang digunakan masyarakat Kepulauan Seribu sehari - harinya. Sebagai contohnya, kosakata yang digunakan untuk mencari ikan seperti *ngalir* (mencari cumi-cumi), *tada-tada* (mencari ikan tongkol dengan perahu), *bubu* (perangkap ikan dari bambu), *ngobor* (mencari ikan pada waktu malam dengan lampu gas), dan *mayang* (jaring yang terbuat dari nilon) adalah kosakata yang berasal dari Bahasa Mandar. Terdapat juga kosakata seperti *babang* (istirahat sambil mencari ikan), *tidung* (kerbau), *godot* (menyulam benang), dan *pangkeng* (kamar) yang berasal dari Bahasa Bugis, *korera* (marah), *preca* (gundu), *como* (bonyok), *ruwet* (kusut), dan *ndak* (tidak) yang berasal dari Bahasa Sunda. Selain penggunaan kosakata, menurut Damarjati (2019), Bahasa



Indonesia-Pulo memiliki dialek yang khas, yaitu *glottal stop*. *Glottal stop* adalah cara pelafalan bunyi 't' dan bunyi 'k' mati dengan pangkal tenggorokan. Contohnya adalah laut menjadi 'lau', kunyit menjadi 'kunyi', belok menjadi 'blengko', dan barat menjadi 'bara'. Selain itu juga ditemukan pelafalan huruf 'u' menjadi 'o', seperti mau menjadi 'mao', timur menjadi 'timor', tidur menjadi 'tidor' dan pohon menjadi 'pokok'. Irsyad (2002) menyebutkan bahwa dialek bahasa yang digunakan orang pulo terdiri dari 4 gaya, yaitu gaya orang Pulau Kelapa yang kental dengan pengucapan vokal yang panjang dan bergelombang, orang Pulau Tidung yang masih dipengaruhi oleh Tangerang Pesisir, orang Pulau Untung Jawa yang masih dipengaruhi kebetawian, dan dialek Melayu. Dari keempat gaya tersebut, orang pulo tetap menggunakan Bahasa Indonesia dengan intonasi yang bergelombang, terdengar nyaring dan kemelayuan. Bahasa orang pulo sangat dipengaruhi oleh Budaya Melayu dan kekhasan penggunaan Bahasa Bugis.

Aspek	Proses Urbanisme
Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> Arsitektur hunian bergaya rumah adat Suku Bugis. Arsitektur bangunan pemerintah bergaya arsitektur Jawa dan Sunda. Penataan permukiman di Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sebira yang menjorok ke area pesisir seperti rumah adat Suku Bugis.
Tradisi	<ul style="list-style-type: none"> Akulturas budaya seperti tradisi Pecak Mandar atau silat Mandar di Pukau Tidung yang merupakan seni beladiri Pencak Silat yang digabungkan dengan gerakan beladiri dari Suku Mandar. Tradisi Sedekah Laut atau Petik Laut yang masih rutin dilakukan oleh nelayan di Kepulauan Seribu yang merupakan tradisi Suku Bugis.
Makanan	<ul style="list-style-type: none"> Makanan khas Kepulauan Seribu seperti Kue Barongko yang juga merupakan makanan khas Suku Bugis.
Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan bahasa Indonesia-Pulo, yang merupakan Bahasa Indonesia yang disertai penggunaan kosakata Suku Mandar, Bugis, Jawa, Betawi dan Sunda Penggunaan dialek <i>Glottal stop</i>, yang merupakan dialek khas masyarakat Suku Bugis.

Wheatley (1983) menjelaskan dua jenis proses urbanisme, yaitu *urban imposition* (sistem paksaan) dan *urban generation* (sistem kebangkitan). Wheatley menggambarkan sistem paksaan sebagai proses urbanisme yang merugikan masyarakat lokal, karena perkembangan kota yang terjadi berasal dari masuknya perkembangan dari luar, bukan transformasi sosial masyarakat lokal. Sistem kebangkitan adalah proses urbanisme yang bersifat positif karena perkembangan kota sejalan dengan perkembangan masyarakat lokal. Di Kepulauan Seribu, proses urbanisme dimulai dari proses kolonialisme. Masuknya VOC dan menjadikan Pelabuhan Jayakarta menjadi Pelabuhan dagang yang berskala besar, adalah bentuk "paksaan" dalam proses integrasi sosial dan budaya di Kepulauan Seribu. VOC menjadikan Pulau Onrust, Cipir, Kelor dan Bidadari menjadi lokasi galangan kapal, Gudang dan benteng pertahanan, dengan membawa ribuan karyawan dari penjuru nusantara juga adalah bentuk "paksaan" dalam proses integrasi sosial dan budaya. VOC menjadikan Pulau Tidung sebagai tempat pengasingan tahanan politik, seperti Raja Penembahan Tidung, adalah bentuk "paksaan" dalam proses integrasi sosial dan budaya. Fakta sejarah ini sesuai dengan teori Paul Wheatley mengenai sistem paksaan, yaitu proses urbanisasi yang dipaksakan, yang biasanya adalah produk ekspansi kekuasaan. Ekspansi kekuasaan yang dilakukan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah - rempah di selat Malaka dengan menguasai Teluk Jakarta, membuka pintu untuk masuknya berbagai macam kelompok etnik di Kepulauan Seribu.

Menilik data dari BPS tahun 2023, 14,11% dari penduduk Kepulauan Seribu berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2022, dengan standar garis kemiskinan Rp 701.088/bulan. Jumlah ini jauh diatas Jakarta Selatan (3,52%), Jakarta Timur (4,3%), Jakarta Pusat (4,9%), Jakarta Barat (4,2%), dan Jakarta Utara (7,24%). Angka ini juga jauh diatas angka persentase penduduk miskin DKI Jakarta



(4,69%). Dari Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022, angka IPM Kepulauan Seribu adalah 72,79, jauh dibawah Jakarta Selatan (85,21), Jakarta Timur (83,45), Jakarta Pusat (82,11), Jakarta Barat (82,51), Jakarta Utara (80,81) dan DKI Jakarta (81,65). Angka pengangguran Kepulauan Seribu Tahun 2022 adalah 9,02%, masih diatas angka pengangguran DKI Jakarta 7,18%. Data - data ini menyebutkan bahwa, walaupun Kepulauan Seribu adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang masih jauh tertinggal dari wilayah DKI Jakarta yang lainnya.

Minimnya investasi di bidang pariwisata adalah salah satu alasan mengapa Kepulauan Seribu tertinggal dari wilayah lain. Mayoritas masyarakat Kepulauan Seribu berprofesi sebagai nelayan. Minimnya kemampuan masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan sektor pariwisata Kepulauan Seribu adalah salah satu alasan minimnya investasi di bidang pariwisata Kepulauan Seribu. Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, dalam Putri (2020) menyebutkan bahwa latar belakang penduduk Kepulauan Seribu, yang bermata pencaharian sebagai nelayan, masih belum bisa menerima ide baru bahwa pariwisata bisa menjadi alternatif mata pencarian baru. Seperti halnya dalam menjalankan usaha penginapan dan menjual makanan khas setempat, mereka masih kurang paham bagaimana cara menyajikan dengan cara yang menarik bagi wisatawan. Selain itu masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat juga menjadi penghambat investasi di bidang pariwisata. Proses urbanisme di Kepulauan Seribu yang “dipaksakan” menghasilkan masyarakat lokal yang baru, dengan keterikatan yang kuat secara sosial dan rasa kepemilikan yang kuat terhadap wilayahnya, Migrasi kelompok-kelompok etnik Bugis, Mandar, Melayu, Sunda dan Betawi yang membentuk masyarakat sosial *orang pulo* masih menjunjung tinggi kekhasan mereka

sebagai pelaut dan nelayan, yang justru menghalangi perkembangan kawasan secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu dimulai pada 1527, pada saat Pelabuhan Sunda Kelapa dibawah kekuasaan Kerajaan Padjajaran direbut oleh Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Fatahillah. Pada saat itu, terjadi migrasi kelompok etnik Betawi dan Sunda dari pesisir Banten ke wilayah Kepulauan Seribu. Lalu proses ini terus berlanjut pada 1610 pada saat Pangeran Jayakarta mengizinkan VOC untuk menguasai perdagangan di Pelabuhan Jayakarta, yang pada akhirnya direbut oleh VOC. Pelabuhan Jayakarta diubah menjadi Pelabuhan Batavia yang menjadi Pelabuhan dagang besar, yang mengundang kapal-kapal dagang dari seluruh Nusantara. Kelompok etnik Bugis dan Mandar yang dari dahulu terkenal sebagai suku pelaut handal datang untuk berdagang, merompak, dan bermukim di wilayah pesisir Batavia, termasuk Kepulauan Seribu. Kelompok etnik Bugis dan Mandar ini bergabung dengan kelompok etnik Jawa, Sunda, Betawi dan Melayu yang sudah lebih dahulu bermukim di Kepulauan Seribu, berketurunan hingga membentuk Kepulauan Seribu seperti sekarang, Mereka tidak lagi mengidentifikasi diri mereka dalam sukunya, namun sebagai “orang pulo” sebutan masyarakat Kepulauan Seribu. Proses urbanisme ini dapat dilihat dari arsitektur, bahasa, tradisi, dan makanannya.

Sesuai dengan teori Wheatley (1983), proses urbanisme yang terjadi di Kepulauan Seribu adalah proses urbanisme sistem paksaan, yang biasanya merupakan produk ekspansi kekuasaan. Ekspansi kekuasaan yang dilakukan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah - rempah di selat Malaka dengan menguasai Teluk Jakarta, membuka pintu untuk masuknya berbagai macam



kelompok etnik di Kepulauan Seribu. Proses urbanisme dengan sistem paksaan di Kepulauan Seribu menyebabkan transformasi masyarakat menjadi masyarakat yang lebih terurbanisasi. Sistem paksaan tersebut membawa dampak signifikan terhadap pembentukan masyarakat sosial baru yang disebut sebagai *orang pulo*. *Orang pulo* merupakan kelompok masyarakat yang mengalami perubahan dalam gaya hidup dan pola interaksi sosial, seiring dengan proses urbanisme yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adryamarthanino, V. (2022). Sejarah Pulau Bidadari. Diakses Pada 10 Juni 2023, dari www.kompas.com.
- [2] Ardianto, P. (2023). Mengenal Pulau Kelor, Peninggalan Kolonial Belanda. Diakses pada 10 Juni 2023, dari www.pulauSeribu.jakarta.go.id.
- [3] BPS (2023) Kepulauan Seribu Dalam Angka. Jakarta, Indonesia.
- [4] Cahyadi, I. (2018). Analisis Kualitas Air Tanah Pada Musim Kemarau di Pulau Koror Panggang, Kepulauan Seribu. Jakarta, Indonesia.
- [5] Castells, M. (2020). *Space Of Flows, Space Of Places : Materials For A Theory Of Urbanism In The Information Age*. The City Reader 7th Edition. Routledge: New York.
- [6] Damarjati, D. (2019). Dipengaruhi Banyak Suku, Kepulauan Seribu Punya Logat Yang Unik. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-4461311/dipengaruhi-banyak-suku-kepulauan-seribu-punya-logat-yang-unik>.
- [7] Fauzan, R. (2022). Penelusuran Jejak Arsitektur Vernakular Bugis Pada Permukiman Nelayan Kamal Muara. Fakultas Teknik. UI: Depok.
- [8] Ibnu, F. (2023). Kue Barongko, Menu Buka Puasa Khas Pulau Sebir. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://www.rri.co.id/kalimantan-utara/ramadan/203277/kue-barongko-menu-buka-puasa-khas-pulau-sebir>.
- [9] Idris, F. (2023). Mengenal Silat Mandar Asli Pulau Tidung. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://www.senibudayabetawi.com/7211/mengenal-silat-mandar-asli-pulau-tidung.html>.
- [10] Irsyad, R. E. (2012). Orang Pulo di Pulau Karang. Suwung: Jakarta.
- [11] Koentjaraningrat. (2011). Pengantar Antropologi 1. Jakarta : Rineka Cipta.
- [12] Kramadibrata, K. (1994). Kedwibahasaan di Kepulauan Seribu. Fakultas Sastra. UI: Depok
- [13] Kurniawan, R. (2023). Desa Wisata Pulau Kelapa, Wisata Bahari Permukiman. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://kolomdesa.com/2023/02/22/desa-wisata-pulau-kelapa-wisata-bahari-pemukiman>.
- [14] Matsuki, H. (2022). LAP Bersama Masyarakat Bugis Gelar Sedekah Laut. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://harianppu.id/2022/01/19/lap-bersama-masyarakat-bugis-gelar-sedekah-laut>.
- [15] Mattulada. (1985). Satu Lukisan Analitik terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [16] Maulana, R. (2009). Bahasa - Bahasa di Kepulauan Seribu. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. UI: Depok.
- [17] Prakoso, R. J. (2019). Kisah Pulau Tidung yang Berasal dari Raja Kalimantan. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-4728197/kisah-pulau-tidung-yang-berasal-dari-raja-kalimantan>.
- [18] Putri, J. (2020). Alasan Kepulauan Seribu Belum Siap Menjadi Bali Baru. Diakses Pada 08 April 2023, dari <https://wartakotatravel.tribunnews.com/2>



- [020/05/11/ini-alasan-kepulauan-seribu-belum-siap-menjadi-bali-baru?page=all](https://doi.org/10.24054/020/05/11/ini-alasan-kepulauan-seribu-belum-siap-menjadi-bali-baru?page=all).
- [19] Selleger, H. (1906). *De Duizend-eilanden. Tijdschrift voor het binnenlandsch bestuur*, H. G. Aalst, Jaargang 1, Aflevering 30, 1 Januari 1906.
- [20] Syamsiyah, I. (1994). Sejarah Kepulauan Seribu. Fakultas Sastra. UI: Depok.
- [21] Tjahjono, G. (1999). Peran Arsitektur dan Antropologi dalam Tata Ruang Kota Indonesia Abad 21. *Antropologi Indonesia*, (59).
- [22] Wheatley, P. (1983). *Nagara And Commandary : Origins of the Southeast Asian Urban Traditions*. Committee On Geographical Studies.
- [23] Wirth, L. (1938). *Urbanism As a Way Of Life*. The City Reader 7th Edition. Routledge: New York.
- [24] Wurjantoro, E. (1994). Kepulauan Seribu Sejarah dan Peninggalan Arkeologinya. Fakultas Sastra. UI: Depok.